

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	RAKYAT MERDEKA	13	27-8-2002

RUU Kelistrikan Rugikan Konsumen

RANCANGAN Undang-Undang Ketenagalistrikan (RUUK) dinilai akan menjadi bom waktu bagi pemerintah. Sebab, begitu UU ini diluncurkan, maka kalangan investor listrik swasta akan melakukan "gugatan balik" ke pemerintah.

Pengamat perminyakan dan energi, Kurtubi dan pakar kelistrikan, ING Nengah Sudja meminta DPR agar menolak RUUK menjadi Undang-Undang Ketenagalistrikan (UUK). "Kalaupun DPR tetap ngotot menyetujui RUUK itu menjadi UUK, kita minta Megawati Soekamoputri untuk tidak mensyahkan UUK tersebut. Kalaupun permintaan ini tak berhasil mari kira berjuang untuk melakukan amandemen terhadap UUK itu," kata Kurtubi dalam Diskusi Panel "Telaah kritis RUUK" di Jakarta, kemarin.

Disamping secara teoritis, lanjutnya penerapan pasar persaingan *Multi Seller Multi Buyers* (MSMB) atau banyak penjual banyak pembeli sulit diwujudkan, sebab calon pemain di sektor listrik swasta sudah terikat dengan Perjanjian jual-beli listrik (*Power Purchase Agreement* PPA).

Menurut dia, pengesahan UU yang akan mengubah sistem kelistrikan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Diingatkan bahwa pengesahan RUUK saat ini di bawah tekanan pihak asing.

"Aspek keekonomian, RUUK bertujuan untuk merusak tatanan yang susah ada dengan memecah PLN. Ini akan berakibat pada semakin mahalnya biaya listrik. Karena, setiap pemain (PT) baik di hulu (pembangkit) maupun hilir (distribusi, transmisi dan penjualan) masing-masing akan memaksimalkan profit, di samping timbulnya biaya transaksi antar pemain yang cukup tinggi," tegas Kurtubi.

Sementara ING Nengah Sudja menegaskan, melihat begitu lemahnya substansi RUUK, mengusulkan anggota DPR jangan terburu-buru menyetujui RUUK tersebut menjadi UUK. Apalagi, dengan dalih desakan Lembaga Keuangan Internasional (IMF).

Nengah Sudja mempertanyakan adanya pernyataan bahwa adanya UUK dimaksudkan untuk menarik/membuka kesempatan investasi sektor tenaga listrik melalui kompetisi.

Bekas pegawai PLN itu, menyayangkan tidak disebutkan pada pasal mana dan bagaimana mekanisme perlindungan kepada konsumen akan dilaksanakan, ditinjau dari kemungkinan kenaikan harga listrik yang tidak wajar. "Oleh karena itu dalam RUUK kami meminta perhatian anggota dewan agar mengantisipasi terjadinya kartelisasi terselebrang antar produsen tenaga listrik," ucapnya. (MAF)